

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2018. *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Effendi perangin, 1987, *Hukum Agraria Jilid I tentang transaksi jual beli hak atas tanah*, Rajawali press, cetakan IV, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 2001, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Musyair Zainuddin, 2010, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta.
- Narullah Dt. Parpatih Nan Tuo, 2004, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sakato Batuah LKAAM Sumatera Barat, Padang.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sediono M. P. Tjondronegoro, 2008, *Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudargo Gautama, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian*

Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tatacara Pendaftaran atas tanah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

C. Tesis dan Jurnal

Irwandi, 2014, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Tesis Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

Syafan Akbar, 2010, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3, no. 2.

D. WEBSITE

Gazali Harun, *Tanah Ulayat Di Minangkabau Dijua Indak Dimakan Bali Digadai Indak Dimakan Sando*, <http://targetdaerah.com/tanah-ulayat-di-minangkabau-di-jua-indak-di-makan-bali-digadai-indak-dimakan-sando/>

Syahril Amiruddin, *Hukum Harta Pusaka Tinggi Dan Tanah*, <http://ajosyahrilamiruddin.blogspot.com/2015/01/hukum-harta-pusaka-tinggi-dantanah.html>

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif.

